

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 106 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
- b. bahwa karena adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2021, maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Disease 2019 (COVID-19)*;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1134);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E)
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021

1.3 Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021

1.5 Dasar Hukum Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2021

Bab II EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2020 DAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2021

3.2. Perubahan Proyeksi Indikator Makro ekonomi daerah Tahun 2021

3.3. Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

5.2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021

BAB VI PENUTUP.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 September 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 106 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021

BAB I

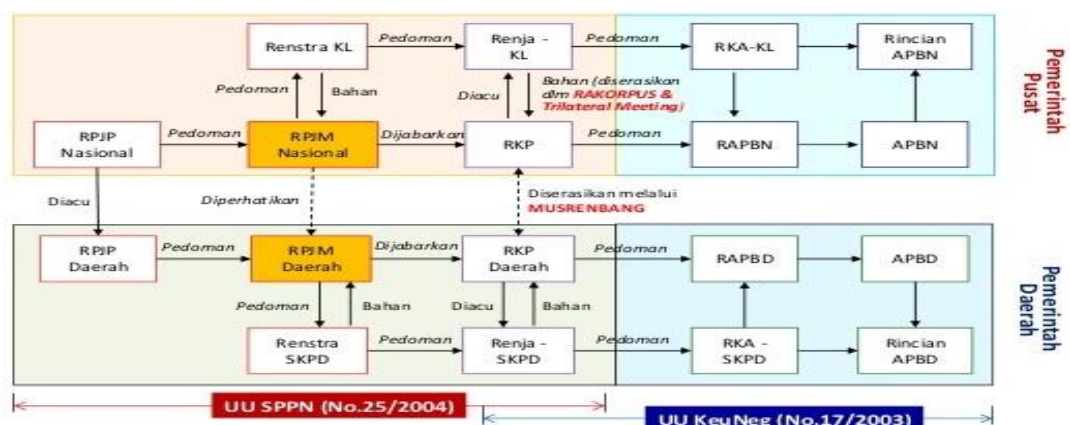
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor tahun 2021 – 2024 yang diikuti perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor melatarbelakangi perlunya dibuat perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Tahun 2021, selain adanya penyesuaian akibat program refocusing dalam rangka penanganan untuk pandemic Covid-19.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPKD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2021 disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Selanjutnya Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Diskominfo Kota Bogor tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 57 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 adalah :

1. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2021 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
3. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2021 pada akhir tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan “baik” dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen).

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2019 dengan capaian sebesar Rp17.693.168.805,00 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) atau 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp18.390.826.293,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 mencapai Rp 7.952.944.046,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) atau 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp 8.520.586.704,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp 9.740.224.759,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh

juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen) 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.870.239.589,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Rumah Tangga OPD dari rencana anggaran Rp 885.502.579,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) realisasi keuangannya mencapai Rp 864.661.028,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,65% (sembilan puluh tujuh koma enam lima persen).

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor dari rencana anggaran Rp 73.353.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp 70.493.151,00 (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 96,1% (Sembilan puluh enam koma satu persen).
2. Pengadaan Inventaris Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp 335.950.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp333.754.848,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima persen).

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD dari rencana anggaran sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terealisasi mencapai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen).

d) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan BANDWIDTH dari rencana anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) terealisasi Rp2.499.990.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen);
2. Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp669.936.800,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp666.657.800,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 99,51% (sembilan puluh sembilan koma lima satu persen);
3. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota dari rencana anggaran sebesar Rp772.327.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp766.861.650,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,29% (sembilan puluh sembilan koma dua sembilan persen).

4. Pemeliharaan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar Rp74.349.750,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) teralisasi sebesar Rp73.640.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,05% (sembilan puluh sembilan koma nol lima persen);
5. Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp74.425.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangannya mencapai Rp73.662.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen);
6. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government dari rencana anggaran sebesar Rp795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp775.790.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 97,55% (sembilan puluh tujuh koma lima lima persen);
7. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp48.493.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp48.493.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);
8. Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room dari rencana anggaran sebesar Rp297.144.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp294.370.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,07 % (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh persen);

9. Digitalisasi Profil dari rencana anggaran sebesar Rp29.551.350,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp29.030.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,24% (sembilan puluh delapan koma dua empat persen);
10. Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan dari rencana anggaran sebesar Rp95.717.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp95.711.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
11. Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan dari rencana anggaran sebesar Rp153.617.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp152.018.000,00 (seratus lima puluh dua jutadelapan belas ribu rupiah) atau sebesar 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen);
12. Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik dari rencana anggaran sebesar Rp11.660.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan lima persen);
13. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smartcity dari rencana anggaran sebesar Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 57,9% (lima puluh tujuh koma sembilan persen);
14. Pengadaan Infrastruktur Data Center dari rencana anggaran sebesar Rp295.782.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp291.270.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,47% (sembilan puluh delapan koma empat tujuh persen);

15. Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Data Center dari rencana anggaran sebesar Rp381.170.450,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp378.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,19% (sembilan puluh sembilan koma satu sembilan persen);
16. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA) dari rencana anggaran sebesar Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp50.240.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,41% (sembilan puluh sembilan koma empat satu persen);
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah dari rencana anggaran sebesar Rp69.995.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp68.690.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,14% (sembilan puluh delapan koma satu empat persen);
18. Pengelolaan *Contact Centre* Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp1.322.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp1.298.654.982,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen);
19. Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik dari rencana anggaran sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta

dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp45.550.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,5% (sembilan puluh enam koma lima persen);

20. Pengembangan Aplikasi Database Komunikasi dari rencana anggaran sebesar Rp35.450.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp34.995.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 98,72% (sembilan puluh delapan koma tujuh dua persen);
21. Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dari rencana anggaran sebesar Rp136.608.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp134.538.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 98,48% (sembilan puluh delapan koma empat delapan persen);
22. Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) dari rencana anggaran sebesar Rp1.429.550,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp0,00 (nol rupiah) atau sebesar 0% (nol persen) karena kegiatan ini hanya honor pelaksanaan kegiatan dan penggandaan dan sudah diserap pada kegiatan lain namun secara output telah disusun 2 (dua) buah Peraturan Wali Kota;
23. Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp353.273.510,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) terealisasi Rp347.275.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 98,3% (sembilan puluh delapan koma tiga persen);
24. Penyelenggaraan Diseminasi Dan Kemitraan Media Publik dari rencana anggaran sebesar Rp63.417.000,00 (enam

puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) terealisasi Rp63.062.600,00 (enam puluh tiga juta enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,44% (Sembilan puluh sembilan koma empat empat persen);

25. Pembangunan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar Rp59.262.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terealisasi Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,39% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan persen);
26. Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp88.200.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi Rp85.527.500,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan tujuh persen);
27. Penilaian Index e-Government Indonesia dari rencana anggaran sebesar Rp33.588.200,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terealisasi Rp29.838.200,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 88,84% (delapan puluh delapan koma delapan empat persen);
28. Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse dari rencana anggaran sebesar Rp36.040.000,00 (tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) terealisasi Rp35.790.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,31% (sembilan puluh sembilan koma tiga satu persen);
29. Penyelenggaraan Statistik Sektorial dari rencana anggaran sebesar Rp4.378.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp4.378.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);

e) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD dari rencana anggaran sebesar Rp8.829.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp8.829.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);
2. Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB									
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	90%	90%			100%			100%
	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Honorarium Non PNS			Honorarium Non PNS : 12 bulan	Honorarium Non PNS : 12 bulan		Honorarium Non PNS : 12 bulan	Honorarium Non PNS : 12 bulan	
		Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan			Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan : 12 bulan	Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan : 12 bulan		Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga) : 12 bulan	Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga) : 12 bulan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga			Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga : 12 bulan	Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga : 12 bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	
		Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah)			Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan		Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	
		Belanja Cetak dan Penggandaan			Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan		Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan) : 12 bulan	Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan) : 12 bulan	
		Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu)			Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu) : 12 bulan	Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu) : 12 bulan		Belanja Pakaian Dinas dan Atribut : 50 stel		
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) : 12 bulan	Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) : 12 bulan	
	Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya outsourcing Data Center			Tersedianya outsourcing Data Center : 1 paket	Tersedianya outsourcing Data Center : 1 paket		Tersedianya outsourcing Pusat Data : 1 paket	Tersedianya outsourcing Pusat Data : 1 paket	
		Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center			Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket	Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket		Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket		
		Tertatanya perangkat data center			Tertatanya perangkat data center : 1 paket	Tertatanya perangkat data center : 1 paket		Tertatanya perangkat Pusat Data : 1 paket	Tertatanya perangkat Pusat Data : 1 paket	
								Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data : 1 paket	Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data : 1 paket	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA			Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket		Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	
	Workshop penyusunan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan			Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 kegiatan	Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 kegiatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor			Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor : 80%	Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor : 69,50%		Tersedianya pelayanan pengaduan 112 : 12 bulan		
								Tersedianya Jasa Layanan Telepon PSTN 112 : 1 paket		
								Tersedianya Tenaga outsourching Petugas NTPD 112 : 1 paket		
								Tersedianya Meja Worksation Supervisor : 3 unit		
								Tersedianya Meja Worksation Kubikel Call Taker : 1 set		
								Tersedianya Kursi Petugas NTPD 112 : 15 unit		
								Tersedianya Seragam Pengaduan Call Center 112 : 1 paket		
								Tersedianya Komputer Operator NTPD 112 : 5 unit		
								Tersedianya Lemari Locker NTPD 112 : 3 set		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Tersedianya Server NTPD 112 : 1 unit		
								Tersedianya Headset Petugas NTPD 112 : 4 unit		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	Tersedianya Perangkat Teleconference			Tersedianya Perangkat Teleconference : 1 paket	Tersedianya Perangkat Teleconference : 1 paket		Terpeliharanya Perangkat Teleconference : 1 paket		
		Tersedianya Server Teleconference			Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	Tersedianya Server Teleconference : 1 paket		Terpeliharanya Perangkat Sound System Wireless : 1 paket	Tersedianya Perangkat Sound System Wireless : 1 paket	
		Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless			Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless : 1 paket	Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless : 1 paket		Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	
	Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan)			Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket		Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan (Sewa Perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan (Sewa Perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	
		Tersedianya Operator Call Center			Tersedianya Operator Call Center : 2 orang	Tersedianya Operator Call Center : 2 orang		Tersedianya Aplikasi BISA yang Update dan Optimal : 1 aplikasi		
								Tersedianya Personal Komputer : 7 unit	Tersedianya Personal Komputer : 7 unit	
								Tersedianya Printer : 2 unit	Tersedianya Printer : 2 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator : 7 unit	Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator : 7 unit	
								Tersedianya Lemari Locker : 1 unit	Tersedianya Lemari Locker : 1 unit	
								Tersedianya Mickropon headset : 10 unit	Tersedianya Mickropon headset : 10 unit	
	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Pembuatan Buku profil			Pembuatan Buku profil : 100 buku	Pembuatan Buku profil : 100 buku		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan NTPD 112 dan Contact Center : 1 paket		
		Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD)			Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD) : 1 paket	Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD) : 1 paket				
	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	Pembuatan Booklet			Pembuatan Booklet : 1 paket	Pembuatan Booklet : 1 paket		Pembuatan Booklet : 1 paket	Pembuatan Booklet : 1 paket	
		Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik			Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik : 1 paket	Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik : 1 paket				
	Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal			Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi		Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	
	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Terkelolanya Komunikasi Persandian			Terkelolanya Komunikasi Persandian : 100%	Terkelolanya Komunikasi Persandian : 100%		Terpeliharanya sistem informasi : 30%	Terpeliharanya sistem informasi : 30%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tersedianya Alat Komunikasi HT			Tersedianya Alat Komunikasi HT : 5 unit	Tersedianya Alat Komunikasi HT : 5 unit		Terkelolanya komunikasi persandian : 100%	Terkelolanya komunikasi persandian : 100%	
		Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi			Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi : 20 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi : 20 orang		Tersedianya alat keamanan informasi : 1 unit	Tersedianya alat keamanan informasi : 1 unit	
		Tersedianya Peralatan Mini Komputer			Tersedianya Peralatan Mini Komputer : 2 jenis	Tersedianya Peralatan Mini Komputer : 2 jenis		Tersedianya sistem keamanan informasi : 2 paket	Tersedianya sistem keamanan informasi : 2 paket	
		Tersedianya Perangkat Sandi			Tersedianya Perangkat Sandi : 3 jenis	Tersedianya Perangkat Sandi : 3 jenis		Tersedianya Anti Virus : 1 paket	Tersedianya Anti Virus : 1 paket	
		Terpeliharanya Peralatan Komunikasi			Terpeliharanya Peralatan Komunikasi : 1 paket	Terpeliharanya Peralatan Komunikasi : 1 paket				
		Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing			Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing : 12 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing : 12 orang				
		Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan			Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan : 10 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan : 10 orang				
	Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)	Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain			Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain : 1 dokumen	Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain : 1 dokumen		Penyusunan Regulasi TIK : 3 dokumen		
		Peraturan			Peraturan	Peraturan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting			Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting : 1 dokumen	Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting : 1 dokumen				
		Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi			Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi : 1 dokumen	Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi : 1 dokumen				
		SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)			SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) : 1 dokumen	SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) : 1 dokumen				
	Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik			Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik	Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik		Terpeliharanya CCTV di Lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik		
		Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota			Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit		Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	
		Terpeliharanya CCTV BGR			Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit	Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit		Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit		
		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV			Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	
		Tersedianya CCTV BGR			Tersedianya CCTV BGR : 2 unit	Tersedianya CCTV BGR : 2 unit		Tersedianya CCTV BGR : 2 unit		
							Terpeliharanya	Terpeliharanya		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	
								Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor : 8 unit	Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor : 8 unit	
								Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor : 3 titik	Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor : 3 titik	
	Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik			Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik : 70%	Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik : 70%		Terselenggarany a Diseminasi Informas dan Kerjasama Media Publik :70%		
		Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah			Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah : 2 paket	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah : 2 paket		Penayangan Iklan di Media Sosial/Website/ Koran/Radio : 70 tayang		
								Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota : 75 kelompok	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota : 48 kelompok	
								Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik : 140 spanduk	Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik : 144 spanduk	
								Terselenggarany	Terselenggaranya	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								a Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) : 1 kali	Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) : 1 kali	
								Lomba Karya Jurnalis : 1 kali	Lomba Karya Jurnalis : 1 kali	
		Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi		Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 (titik kelurahan)	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 (titik kelurahan)		Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 titik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 5 titik	
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat		Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 1 paket	Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 1 paket		Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat : 1 paket	Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat : 1 paket	
			Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center)		Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket	Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket		Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket		
								Pengadaan Banner : 150 buah	Pengadaan Banner : 150 buah	
								Pengadaan Brosur/Leaflet : 5000 lembar	Pengadaan Brosur/Leaflet : 5000 lembar	
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity	e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak		e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak : 25 orang	e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak : 30 orang		e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	
			Lomba		Lomba	Lomba Pembuatan		Lomba	Lomba Pembuatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak			Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak : 25 orang	Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak : 30 orang		Pembuatan Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	
		Kampanye Literasi TIK			Kampanye Literasi TIK : 25 orang	Kampanye Literasi TIK : 30 orang				
		SK Tim Panitia Lomba			SK Tim Panitia Lomba: 1 dokumen	SK Tim Panitia Lomba: 1 dokumen				
	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik			SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik : 70 Orang	SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik : 64 Orang		Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik : 30 OPD	Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik : 30 OPD	
	Penilaian Index E-Government Indonesia							Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE : 3,13 index	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE : 3,10 index	
								Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE : 150 orang	Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE : 130 orang	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral							Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral : 5 kali	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral : 5 kali	
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (Orang/PD)	2 orang	2 orang			100%			100%
	Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD			Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang		Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	
	Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government			Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government : 1 dokumen	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government : 1 dokumen				
	Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah			Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah : 100 orang	Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah : 100 orang		Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 100 orang	Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 100 orang	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan proyeksi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+2)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)	(7)					(12)
1	indeks e-government			3,21	3,29	-	-	3,03	3,10	-	-	
2	Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik			68%	80%	-	-	63,8%	66%	-	-	
3	Persentase CCTV yang diintegrasikan			90%	96%	-	-	90%	96%	-	-	
4	Persentase Integrasi Data SIM			18,45%	20,39%	-	-	18,45%	20,59%	-	-	
5	Persentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait			65%	70%	-	-	80,14%	80,14%	-	-	
6	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas			B	B	B	BB	BB	BB	-	-	
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			100%	100%	90	90	100%	100%	-	-	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

1. Penyediaan Ruang Server yang Layak;
2. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC);
3. Kurangnya SDM TIK yang kompeten;

4. Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
5. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil;
6. Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun;
7. Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral;
8. Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
9. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan;
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan Layanan Interoperabilitas;
4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
5. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi;
6. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik;
7. Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data;
8. Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.

9. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
10. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
12. Mengembangkan muatan *e-Government*.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada tahun 2021 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlihat pada tabel 2.4. berikut ini:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	85%	1.415.000.000,00						
2	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bogor	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	30.000.000,00						
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	1.342.000.000,00						
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kota Bogor	Hasil Penilaian SPBE	2,92 Indeks	9.600.412.000,00						
			Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	21%							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Keterbukaan Informasi public	100%							
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	90%							
5	Pengembangan Data dan Informasi	Kota Bogor	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	60%	142.342.500,00						
6	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Bogor	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73%	547.129.000,00						
7	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	1 Indeks	134.538.000,00						

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

A. Tujuan Perubahan Renja

Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
- b. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dibidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 yaitu pemanfaatan TIK dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

B. Sasaran Perubahan Renja

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Sasaran Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor berdasarkan Perubahan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*;
2. Tersedianya data statistik sektoral;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas;

3.3. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan terdiri dari:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah
 - 1) Administrasi Keuangan;

- 2) Administrasi Umum;
- 3) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Program Aplikasi informatika
 - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Informasi dan komunikasi publik
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan statistik sektoral
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada program-program dan kegiatan tersebut mengalami perubahan pagu indikatif sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Perubahan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
		Sebelum	Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23,340,842,364	25,458,811,476	28,738,744,656
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,034,801,454	13,135,139,506	13,492,313,956
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,020,000	13,020,000	30,000,000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,182,389,748	9,427,877,562	8,656,383,956
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710,853,700	656,521,700	1,131,100,000
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164,848,900	144,598,800	500,000,000
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,490,004,106	2,503,239,444	2,524,000,000
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,685,000	389,882,000	650,830,000
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4,052,189,300	5,452,707,100	5,795,652,950
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,052,189,300	5,452,707,100	5,795,652,950

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
		Sebelum	Sesudah	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6,253,851,610	6,870,964,870	9,450,777,750
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,004,807,900	4,767,811,200	5,095,978,900
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,249,043,710	2,103,153,670	4,354,798,850
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	276,325,200	243,053,200	629,198,350
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	276,325,200	243,053,200	629,198,350
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	276,325,200	243,053,200	629,198,350
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	226,630,000	165,217,000	260,624,500
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	226,630,000	165,217,000	260,624,500
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	226,630,000	165,217,000	260,624,500
TOTAL		23,843,797,564	25,867,081,676	57,133,681,529

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada tahun 2021 mempunyai 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 (empat) program sedangkan 1 (satu) program sebagai pendukung. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Adapun untuk pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 mengalami perubahan dari semula sebesar Rp. 23,843,797,564 (dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), menjadi sebesar Rp. 25,867,081,676 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Sumber Dana	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2 16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2 16 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah	Maturitas SPIP	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	BB Point	BB Point	4 Dokumen	4 Dokumen	88 Point	88 Point	13,020,000	13,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	30,000,000
2 16 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	9,182,389,748	9,427,877,562	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	8,656,383,956
2 16 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	BB Point	BB Point	100 %	100 %	95 %	95 %	13,789,000	13,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	15,900,000
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	BB Point	BB Point	4 Paket	4 Paket	95 %	95 %	391,029,300	340,999,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	430,000,000
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	BB Point	BB Point	1 Paket	1 Paket	95 %	95 %	25,120,400	20,818,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	29,280,000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	BB Point	BB Point	100 %	100 %	95 %	95 %	280,915,000	280,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	655,920,000
2 16 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase pemenuhan sarana	tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Manajemen Aset	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	85 %	85 %	5 Paket	2 Paket	100 %	100 %	164,848,900	144,598,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan sarana	85 %	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
	Bangunan Lainnya	prasarana aparatur	Bangunan Lainnya												prasarana aparatur			
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,490,004,106	2,503,239,444				2,524,000,000	
2 16 01 2.08 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	tersedianya jasa komunikasi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	85 %	24,000,000	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Hutang TA 2020 tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat tersedianya outsourcing operator bogor green room Tersedianya Outsourcing CCTV Tersedianya outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Tersedianya Outsourcing Jaringan Infrastruktur Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik Tersedianya outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Tersedianya Outsourcing Pusat Data Tersedianya Pengelola Portal Data Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	85 %	85 %	4 orang 13 Orang 1 PAKET 1 Paket 1 PAKET 1 Paket 1 Paket 8 Orang 1 PAKET Paket Orang 2 Orang	1 PAKET 4 orang 13 Orang 1 PAKET 1 Paket 1 PAKET 1 Paket 1 Paket 8 Orang 8 Orang 1 PAKET Paket Orang 2 Orang	100 % 100 %	100 %	2,478,004,106	2,491,239,444	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	85 %	2,500,000,000	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											473,685,000	389,882,000				650,830,000	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase pemenuhan	tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan	Rasio anggaran sisa terhadap total	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	13 kendaraan 1 Paket	13 kendaraan 1 Paket	100 %	100 %	294,720,000	243,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase pemenuhan	100 %	330,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan operasional perangkat daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor	belanja dalam APBD setahun sebelumnya											(PAD))		Kebutuhan operasional perangkat daerah					
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin tersedianya Pemeliharaan Komputer- Komputer tersedianya suku cadang alat angkutan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	100 %	100 %	53,242,000	53,242,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	70,830,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	tersedianya jasa konsultansi pengawasan tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	1 Paket 1 Paket	1 paket 1 Paket 423 m2	100 %	100 %	125,723,000	92,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	250,000,000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										4,052,189,300	5,452,707,100					5,795,652,950	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										4,052,189,300	5,452,707,100					5,795,652,950	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100 %	100 %			100 %	100 %	.0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100 %	43,332,000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik	Forum Perhumas Kegiatan Bakohumas Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial Perangkat Penunjang Komunikasi Publik Tersedianya Booklet Smart City	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	1 Kegiatan 24 Tayangan 1 Paket 300 buku	1 Kegiatan 1 Kegiatan 24 Tayangan 1 Paket 300 buku	100 %	100 %	932,835,700	936,396,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100 %	1,000,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik	Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	44 Lembaga 1 Paket 1 Paket	0 Lembaga Dokumen Paket 1 Paket 0 Kali	100 %	100 %	365,024,500	318,714,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100 %	1,185,770,175

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
			Publik (KIP) Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Workshop KIP																		
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase Keterbukaan Informasi publik	Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan Tersusunnya DED Media Center	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	100 %	100 %	1 Tahun 1 Tahun 1 Konten	1 Tahun 466 Meter 1 Tahun 1 Desain	100 %	100 %	2,754,329,100	4,197,596,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100 %	3,566,550,775
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA													9,450,777,750			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										4,004,807,900	4,767,811,200				5,095,978,900	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	21 %	21 %	1 TAHUN	1 TAHUN	68 %	68 %	49,730,000	49,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	21 %	57,189,500
2	16	03	2.01	03	Penyelenggara an Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester Perangkat Daerah dan Keluruhan Terpeliharanya Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) dan Tertatanya Jaringan Intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor Terpeliharanya Wifi Ruang Publik Tersedianya Bandwidht Internet se Kota Bogor Tersedianya Jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah Tersedianya Wifi Ruang Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	21 %	21 %	5 Titik 146 Titik 400 Mbps 10 Titik	7 Titik 146 Titik 5 Titik 900 Mbps 10 Titik 1 Titik	68 %	68 %	3,955,077,900	4,718,081,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	21 %	5,038,789,400
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										2,249,043,710	2,103,153,670				4,354,798,850	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian SPBE		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		2.92 Indeks	2.92 Indeks			21 %	21 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	27,893,250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	16	03	2.02	02	Kabupaten/ Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Hasil Penilaian SPBE	Sosialisasi/ Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	3 Kali	3 Kali	21 %	21 %	106,170,000	106,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	122,095,500
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian SPBE	Terkelolanya Perangkat Pusat Data Tersedianya Data Recovery Center Tersedianya Router	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	21 %	21 %	369,018,600	314,557,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	784,155,100	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian SPBE	Terkelolanya Perangkat Teleconference Kota Bogor	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	1 Paket	1 Paket	21 %	21 %	74,968,000	74,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	86,213,200	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Hasil Penilaian SPBE	Terpeliharanya Jumlah Titik CCTV di Lingkup Kota Bogor Tersedianya CCTV	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	69 titik	69 titik 0 unit	21 %	21 %	259,574,800	115,734,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	402,427,550	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Hasil Penilaian SPBE	Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid Tersedianya Colocation Server Webmail Kota Bogor Tersedianya Harddisk Server Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor Tersedianya Memory Server Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi Tersedianya Workshop Integrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	3 APLIKASI 1 APLIKASI 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN	3 APLIKASI 1 APLIKASI 1 TAHUN 2 UNIT 1 TAHUN 1 TAHUN 5 UNIT 1 PAKET 1 UNIT 1 PERTEMUAN	21 %	21 %	550,182,400	850,182,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	1,377,314,750	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung	Hasil Penilaian SPBE	Terpeliharanya Server Datawarehouse	Persentase layanan publik yang	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	1 PAKET	1 PAKET	21 %	21 %	39,474,910	39,474,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	45,396,250	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Layanan Pemerintah			diselenggarakan secara online dan terintegrasi											(PAD))					
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Hasil Penilaian SPBE	tersedianya anjungan promosi tersedianya reklame untuk promosi smart city tersedianya Sarana Komunikasi Digital	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	5 Set	0 Set 0 Paket 0 Paket	21 %	21 %	137,400,000	62,219,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	330,510,000		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian SPBE	terpeliharanya perangkat multimedia bogor green room/ command center terpeliharanya perangkat multimedia ruang rapat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tersedianya lisensi zoom meeting Tersedianya peralatan personal komputer	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	1 Paket	1 Paket 0 Paket 0 Paket	21 %	21 %	688,000,000	515,592,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	1,150,000,000		
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Hasil Penilaian SPBE	Tercapainya hasil penilaian SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2.92 Indeks	2.92 Indeks	2.92 Indek	2.92 Indek	21 %	21 %	24,255,000	24,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	28,793,250		
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											276,325,200	243,053,200			629,198,350				
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											276,325,200	243,053,200			629,198,350				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											276,325,200	243,053,200			629,198,350				
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	73 %	73 %	2 paket	2 paket	73 %	73 %	118,254,000	116,054,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73 %	214,278,350		
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	73 %	73 %	1 Media	1 Media	73 %	73 %	43,049,200	43,049,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73 %	206,416,950		
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Terselenggaranya sosialisasi standar data dan metadata Tersusunnya Buku Induk Statistik Tersusunnya metadata statistik sektoral	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	73 %	73 %	1 Kali 1 paket 1 Paket	1 Kali 1 paket 1 Paket	73 %	73 %	115,022,000	83,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD))		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73 %	208,503,050		
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											226,630,000	165,217,000			260,624,500				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											226,630,000	165,217,000			260,624,500				
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											226,630,000	165,217,000			260,624,500				
2 2 0 2.01 03 1 2	Pelaksanaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan	Tersedianya Antivirus Tersedianya Firewall	Tingkat keamanan informasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1 Level	1 Level	12 Lisensi 1 Lisensi	12 Lisensi 1 Lisensi	1 level	1 level	200,515,000	165,217,000			Indeks Keamanan	1 Level	230,592,250		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi (Indeks KAMI)	Tersedianya Sistem Operasi (Windows) Tersedianya Software (Microsoft Office) Tersedianya SSL	pemerintah				10 Lisensi 10 Lisensi 1 Lisensi	10 Lisensi 5 Lisensi 1 Lisensi							Informasi (Indeks KAMI)					
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1 Level	1 Level	102 Set	0	1 level	1 level	26,115,000	0	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	1 Level	30,032,250	
TOTAL															23,843,797,564	25,867,081,676					57,133,681,529

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.